PENGARUH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TENAGA MEDIS DI KOTA PADANG.

FIQHI DAHABI, 22150004, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, 89 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang, serta mengkaji implikasi hukum dari belum tersinkronisasinya regulasi pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem hukum kesehatan nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis, namun implementasinya di daerah masih menghadapi kendala akibat belum tersedianya regulasi pelaksana yang memadai.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penguatan terhadap perlindungan hak tenaga medis melalui jaminan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan kerja, hak atas pengembangan kompetensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Majelis Disiplin Profesi. Namun demikian, implementasi di Kota Padang belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kekosongan regulasi pelaksana di tingkat daerah yang mengakibatkan belum adanya pedoman operasional yang memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis. Beberapa kasus hukum medis di Kota Padang menunjukkan bahwa tenaga medis masih berpotensi menghadapi proses hukum tanpa adanya mekanisme perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi melalui pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana guna menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Perlindungan Hukum, Hak Tenaga Medis, Kota Padang.

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH ON THE PROTECTION OF MEDICAL PERSONNEL'S RIGHTS IN PADANG CITY

FIQHI DAHABI, 22150004, *Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Law Study Program, Dharma Andalas University, Eighty Nine Pages, Year 2026*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 17 of 2023 on Health concerning the protection of the rights of medical personnel in Padang City and to examine the legal implications arising from the lack of synchronization of implementing regulations at the regional level. This research is motivated by the reform of Indonesia's national health legal system through Law Number 17 of 2023, which strengthens legal protection for medical personnel. However, its implementation at the local level still encounters challenges due to the absence of adequate implementing regulations.This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research.

The findings indicate that Law Number 17 of 2023 strengthens the protection of the rights of medical personnel by providing legal protection, occupational safety guarantees, opportunities for professional competency development, and medical dispute resolution mechanisms through the Professional Disciplinary Council. Nevertheless, the implementation in Padang City has not yet been optimal due to the absence of synchronized regional implementing regulations, resulting in a lack of operational guidelines that ensure legal certainty for medical personnel. Several medical legal cases in Padang City demonstrate that medical personnel remain vulnerable to legal proceedings without fully benefiting from the protection mechanisms mandated by Law Number 17 of 2023. Therefore, the Government of Padang City should promptly harmonize its regional regulations by issuing Regional Regulations (Peraturan Daerah) or Mayor Regulations (Peraturan Wali Kota) as implementing regulations to ensure legal protection for medical personnel and strengthen legal certainty in the delivery of healthcare services.

Keywords: *Implementation, Law Number 17 of 2023 on Health, Legal Protection, Rights of Medical Personnel, Padang City*.